

PERANCANGAN ULANG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA DENGAN PENDEKATAN BRAND IDENTITY

Ichza Rifa Iwari¹, Arnanti Primiana Yuniati², Mohd Ridho Kurniawan³

^{1,2,3} Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi No 1, Terusan Buah Batu – Bojongo, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40257

ichzarifa@student.telkomuniversity.ac.id, arnanti@telkomuniversity.ac.id, mridhokurniawan@telkomuniversity.ac.id

Abstrak: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa menghadapi tantangan operasional seperti antrean panjang, sirkulasi ruang terbatas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya kepercayaan masyarakat akibat persepsi buruk terhadap layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan merancang ulang interior KPP Pratama Tigaraksa dengan konsep alur aktivitas linear dan zonasi fungsional untuk meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, serta citra institusi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, meliputi observasi lapangan, wawancara dengan petugas dan pengunjung, dokumentasi visual, dan analisis literatur tentang desain ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain eksisting memiliki masalah seperti jalur sirkulasi sempit, kurangnya zonasi yang jelas, dan minimnya sistem wayfinding. Solusi desain yang diusulkan meliputi alur pengunjung berurutan (masuk–antrean–tunggu–pelayanan–keluar), zonasi fungsional (tunggu, konsultasi, pelayanan), penambahan fasilitas ergonomis, jalur sirkulasi lebar sesuai PermenPUPR 22/2018, dan signage berbasis warna untuk memperkuat identitas Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, sekaligus mendorong kepatuhan pajak melalui persepsi positif masyarakat.

Kata kunci: alur aktivitas linear; zonasi fungsional; desain interior; efisiensi pelayanan; KPP Pratama Tigaraksa

Abstract The Tax Service Office (KPP) Pratama Tigaraksa faces operational challenges such as long queues, limited circulation space, inadequate facilities, and low public trust due to poor perceptions of tax services. This study aims to redesign the interior of KPP Pratama Tigaraksa using a linear activity flow and functional zoning to enhance operational efficiency, user comfort, and institutional image. A qualitative case study approach was employed, involving field observations, interviews with staff and visitors, visual documentation, and literature analysis on public space design. Findings reveal issues in the existing design, including narrow circulation paths, unclear zoning, and insufficient wayfinding systems. Proposed design solutions include a sequential visitor flow (entry–queue–waiting– service–exit), functional zoning (waiting, consultation, service areas), ergonomic facilities, wider circulation paths compliant with PermenPUPR 22/2018, and color-coded signage to reinforce the Directorate General of Taxes' identity. This approach improves operational efficiency, reduces waiting times, enhances user experience, and promotes tax compliance through positive public perceptions.

Keywords: library, user behavior, interior design, space zoning, comfort, space preferences.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu instansi pelayanan publik, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa memegang peranan penting dalam mengelola administrasi perpajakan. Namun, hasil pengamatan langsung di lapangan mengungkapkan berbagai masalah operasional, seperti antrean panjang, ruang gerak terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pengguna, tetapi juga menghambat kinerja petugas. Masalah ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan atas kenaikan tarif pajak dan kualitas layanan yang kurang memuaskan (Raja et al., 2020, hlm. 512). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam perancangan interior untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus kenyamanan pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang interior KPP Pratama Tigaraksa dengan menerapkan konsep alur aktivitas linear dan memperkuat identitas visual Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Ching (2015, hlm. 245), desain ruang yang baik harus mempertimbangkan urutan fungsi secara logis. Alur aktivitas linear mengacu pada pergerakan pengguna yang terarah dari satu area ke area berikutnya tanpa hambatan, sehingga penting dalam ruang publik untuk mencegah penumpukan dan kebingungan pengguna (Ibrahim & Yusof, 2021, hlm. 04021032). Pendekatan ini didukung oleh strategi zonasi fungsional, yang memisahkan ruang tunggu, konsultasi, dan pelayanan untuk memaksimalkan efisiensi tanpa gangguan, sebagaimana dijelaskan Neufert (2012, hlm. 189).

Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi alur aktivitas linear dengan pembagian zona yang memperhatikan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna secara menyeluruh. Pendekatan ini selaras dengan PermenPUPR 22/2018, yang menekankan aksesibilitas universal dalam gedung pemerintahan, termasuk lebar koridor minimal dan fasilitas untuk penyandang disabilitas guna menjamin kemudahan akses bagi semua

pengguna (Widjaja & Putri, 2022, hlm. 305). Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, serta memperkuat citra institusi di mata masyarakat. Manfaatnya mencakup kontribusi terhadap pengembangan teori desain interior pada ruang publik, khususnya dalam konteks efisiensi operasional kantor pelayanan publik melalui pola sirkulasi ruang linear. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna layanan pajak melalui desain interior yang lebih tertata, serta mendorong kepatuhan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, sehingga menciptakan persepsi positif di kalangan masyarakat (Dewi & Pratama, 2023, hlm. 125).

Penerapan alur aktivitas linear yang didukung oleh zonasi fungsional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan tren modernisasi pelayanan publik yang berfokus pada efisiensi, inklusivitas, dan pengalaman pengguna (Santosa & Widodo, 2023, hlm. 90). Penelitian ini menawarkan solusi yang belum banyak diterapkan secara terstruktur dalam desain interior instansi pemerintahan, memberikan sumbangsih baru dalam transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan berpusat pada pengguna (Setiawan & Nugroho, 2021, hlm. 347).

Ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, serta memperkuat citra institusi di mata masyarakat.

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori desain interior pada ruang publik, khususnya dalam konteks efisiensi operasional kantor pelayanan publik melalui pola sirkulasi ruang linear.

Meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna layanan pajak melalui desain interior yang lebih tertata, dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak melalui

peningkatan kualitas pelayanan sehingga menciptakan persepsi positif untuk masyarakat.

KASUS STUDI DAN METODE PENELITIAN

A. STUDI LAPANGAN

Kasus studi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, yang merupakan salah satu unit pelayanan pajak yang bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Alasan pemilihan kasus ini adalah untuk mengkaji bagaimana desain interior kantor pajak dapat memengaruhi pengalaman pelayanan bagi pengunjung serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Kantor pajak seringkali dipandang sebagai tempat yang kurang ramah dan tidak efisien dalam hal pelayanan. Oleh karena itu, kasus ini dipilih untuk menggali potensi desain ruang yang dapat memperbaiki interaksi antara petugas pajak dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kepuasan pengguna layanan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang menggabungkan observasi langsung terhadap desain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, wawancara dengan petugas dan pengunjung, serta analisis literatur mengenai desain ruang pelayanan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana elemen-elemen desain interior dapat mempengaruhi interaksi dan pengalaman pengguna, serta bagaimana desain tersebut berperan dalam menciptakan kesan positif terhadap Kantor Pajak.

Tahapan penelitian terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Observasi Langsung: Peneliti mengamati kondisi fisik dan fasilitas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, termasuk desain interior, ruang pelayanan, dan aksesibilitas bagi pengunjung.

2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan petugas pajak dan pengunjung untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh pengguna layanan dan memperoleh insight tentang persepsi mereka terhadap Kantor Pajak.

3. Analisis Literatur: Peneliti mengkaji teori-teori desain interior yang relevan, serta studi-studi sebelumnya yang membahas pengaruh desain ruang terhadap kepuasan pengguna dan persepsi terhadap institusi publik.

4. Penyusunan Rekomendasi Desain: Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan literatur, peneliti menyusun rekomendasi desain untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa yang lebih efisien, nyaman, dan sesuai dengan identitas brand Kantor Pajak.

HASIL DAN TEMUAN

Analisis terhadap kondisi eksisting KPP Pratama Tigaraksa menunjukkan beberapa masalah utama yang berpengaruh terhadap efisiensi operasional pelayanan perpajakan. Temuan ini disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan staf dan pengguna layanan, serta dokumentasi visual dan studi pustaka. Tabel berikut merangkum temuan utama:

Tabel 1 Permasalahan eksisting

No	Masalah Eksisting	Implikasi Terhadap Efisiensi Operasional	Solusi
1	Jalur sirkulasi sempit	Menurunkan kepuasan pengguna layanan	Menambah meja loket pelayanan helpdesk

	 <p>Gambar 1 Suasana Area Kantor Sumber : Dokumentasi pribadi</p>	Menghambat pergerakan dan produktivitas	
2	Fasilitas ruang tunggu terbatas	Tidak mendukung kenyamanan wajib pajak	Menambah ruang prioritas untuk disabilitas maupun pensiunan ASN
3	Tidak ada zoning ruang yang jelas	Menyebabkan kebingungan dan kepadatan	Membagi beberapa ruang yang saling berkaitan secara berdekatan dan membuat signage ruangan

4	Identitas visual DJP tidak konsisten 	Melemahkan citra institusi	Menambah elemen interior yang diambil dari visi misi dan budaya kerja
5	Minimnya sistem wayfinding	Menyulitkan orientasi pengguna	Menambah sistem wayfinding yang jelas agar memudahkan pengunjung menemukan informasi

Sumber : Analisa pribadi

3.1.1 Solusi Desain Berbasis Linear Activity Flow

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, penelitian ini mengusulkan lima strategi desain berbasis alur aktivitas linear yang mengutamakan efisiensi dan pengalaman pengguna.

- A. Alur pengunjung dirancang secara berurutan: masuk → pengambilan nomor antrean → area tunggu → loket pelayanan → keluar. Penataan ini didukung oleh zonasi fungsional, meliputi zona tunggu, konsultasi, dan pelayanan.
- B. Penambahan kursi ergonomis, fasilitas air minum, pencahayaan alami, serta jalur sirkulasi selebar 120–150 cm untuk dua arah, sesuai standar PermenPUPR No. 22/2018.
- C. Penerapan warna biru dan kuning, material kaca transparan, serta signage khas DJP untuk memperkuat identitas institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- D. Penggunaan penanda arah berbasis warna dan simbol (color-coded signage) di setiap zona untuk memudahkan orientasi dan meningkatkan efisiensi pergerakan pengguna.
- E. Perancangan tata ruang divisualisasikan melalui mock-up digital dan simulasi alur pengguna untuk memastikan konsep desain berfungsi secara optimal.

Dengan solusi ini, desain interior KPP Pratama Tigaraksa diharapkan dapat menjadi prototipe peningkatan kualitas layanan publik melalui pendekatan desain interior yang terstruktur, efisien, dan human-centered.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan seluruh karyawan kepala seksi di setiap divisi, karyawan menjelaskan hubungan kedekatan kerja antar divisi dan juga mengungkapkan berbagai kebutuhan mereka seperti membutuhkan ruang kolaborasi di setiap divisi dan membutuhkan area penyimpanan khusus untuk dokumen mereka. Berdasarkan wawancara jumlah pengunjung perharinya sekitar 200 orang dengan pengunjung rata-rata berusia 18 tahun hingga lanjut usia.

HASIL DAN DISKUSI

Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan interior ruang pelayanan publik memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas operasional dan membentuk persepsi positif masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Abdullah & Osman, 2020). Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa mengungkapkan bahwa persoalan ruang, meskipun tampak sebagai aspek teknis, memiliki dampak yang luas terhadap kualitas pelayanan, produktivitas kerja, hingga tingkat kepercayaan publik. Ruang pelayanan yang tidak dirancang secara optimal dapat menimbulkan ketidaknyamanan, memperlambat arus layanan, serta menciptakan kesan birokrasi yang kaku dan tidak adaptif terhadap kebutuhan pengguna (Kim & Park, 2022). Kondisi ini tercermin dari beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian, seperti sirkulasi ruang yang tumpang tindih, tidak jelasnya zonasi fungsional, dan minimnya sistem navigasi visual (Ahmad & Ali, 2019).

Konsep alur aktivitas linear yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi kerangka utama dalam merespons permasalahan tersebut. Alur ini mengatur pergerakan pengguna dari tahap masuk, pengambilan nomor antrean, ruang tunggu, pelayanan, hingga pintu keluar secara berurutan dan tidak saling menyilang. Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan linear memiliki keunggulan dalam menciptakan pola arus yang mudah dipahami, mengurangi potensi penumpukan, serta memberikan kepastian arah bagi pengguna layanan. Tidak hanya mengatur arus pergerakan, struktur linear juga membentuk ritme dan urutan pengalaman ruang yang lebih intuitif (Brown & Katz, 2016). Dengan demikian, pengguna tidak hanya berpindah dari satu titik ke titik lainnya

secara fisik, tetapi juga mengalami proses pelayanan sebagai sebuah rangkaian yang terstruktur dan terarah.

Penerapan zonasi fungsional menjadi aspek pelengkap yang memperkuat efisiensi ruang. Zonasi dalam konteks ini bukan sekadar pemisahan fisik, tetapi penyusunan area berdasarkan fungsi dan tingkat kebutuhan interaksi. Area tunggu dirancang terpisah dari ruang konsultasi, dan keduanya tidak bersinggungan langsung dengan area pelayanan administratif (Arifin & Santoso, (2022). Hal ini bertujuan meminimalkan gangguan, menciptakan privasi yang memadai bagi pengguna, serta memperlancar alur komunikasi antara petugas dan pengunjung. Zonasi juga memungkinkan optimalisasi sumber daya, seperti pengaturan petugas berdasarkan kebutuhan ruang tertentu, serta alokasi fasilitas sesuai dengan karakteristik penggunanya.

Selain aspek struktural, penelitian ini juga menekankan pentingnya elemen-elemen penunjang kenyamanan dan aksesibilitas. Fasilitas ergonomis seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan alami, dan ventilasi silang didesain untuk menciptakan suasana yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat (Alotaibi & Zhang, 2021). Penggunaan jalur sirkulasi selebar 120–150 cm sesuai dengan standar PermenPUPR No. 22 Tahun 2018 menjadi bentuk penerapan prinsip inklusivitas dalam desain (PermenPUPR, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari kemampuan ruang dalam memberikan rasa aman, mudah dijangkau, dan adil bagi semua kelompok, termasuk lansia, ibu dengan anak, serta penyandang disabilitas (Lee & Wong, 2017).

Penguatan identitas visual institusi menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam konteks pelayanan publik, identitas visual berfungsi sebagai representasi nilai, budaya kerja, dan profesionalisme lembaga (Mintzberg, 1979). Dalam desain yang diusulkan, warna-warna yang identik dengan Direktorat Jenderal Pajak, seperti biru dan kuning, dipadukan secara harmonis dengan elemen interior lain seperti material kaca dan elemen grafis untuk membentuk suasana yang modern namun tetap mencerminkan

otoritas. Identitas visual yang kuat dan konsisten tidak hanya menciptakan suasana ruang yang khas, tetapi juga memperkuat rasa percaya pengguna terhadap institusi, sekaligus membentuk asosiasi positif bahwa layanan pajak adalah layanan yang terbuka, terorganisasi, dan responsif (Norman, 2013).

Di sisi lain, keberadaan sistem wayfinding berbasis warna dan simbol menjadi bagian integral dalam membangun keterarahan dan kejelasan navigasi di dalam gedung. Sistem ini penting tidak hanya bagi efisiensi operasional, tetapi juga dari perspektif psikologis pengguna (Farid & Rahim, 2020). Ketidakpastian arah dapat menimbulkan kecemasan, menambah waktu layanan, dan meningkatkan beban kognitif pengguna, terutama mereka yang baru pertama kali datang atau memiliki keterbatasan dalam membaca teks. Dengan menggunakan signage yang berbasis warna dan ikon universal, orientasi pengguna menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga keseluruhan pengalaman layanan terasa lebih lancar dan menyenangkan (Caplan & Van Harrison, (2018).

Secara konseptual, temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Person-Environment Fit* yang menjelaskan bahwa kenyamanan dan efektivitas interaksi dalam ruang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana lingkungan fisik mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, desain interior yang baik bukan hanya memenuhi standar teknis semata, tetapi juga memperhatikan dimensi psikososial pengguna. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip efisiensi alur, kenyamanan spasial, dan identitas institusi, desain yang diusulkan dalam penelitian ini menjadi contoh konkret bagaimana desain interior dapat memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi pelayanan publik.

Implikasi dari hasil penelitian ini tidak terbatas pada KPP Pratama Tigaraksa semata. Permasalahan serupa ditemukan pula di berbagai instansi pelayanan publik lainnya yang belum menerapkan desain ruang secara terstruktur dan berorientasi pada pengguna (Hassan & Lee, 2019). Oleh karena itu, pendekatan desain berbasis alur aktivitas linear dan zonasi fungsional dapat direkomendasikan sebagai model adaptif bagi pengembangan infrastruktur layanan publik yang lebih responsif, ramah pengguna, dan

berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan penerapan desain seperti ini juga dapat berdampak pada peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, bahkan dalam jangka panjang dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan negara, sebagaimana yang diharapkan dalam konteks pelayanan perpajakan (Neufert, 2012).

SOLUSI

Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan ruang di KPP Pratama Tigaraksa, diperlukan langkah serius dalam menciptakan zonasi yang jelas untuk memisahkan fungsi dan aktivitas pengunjung. Dalam perancangan desain, pengguna menginginkan ruang yang nyaman dan mendukung aktivitas harian mereka. Oleh karena itu, area pelayanan wajib pajak perlu ditata dengan batas visual dan fungsional yang jelas, menggunakan warna seperti biru tua dan kuning untuk mencerminkan identitas Direktorat Jenderal Pajak, perbedaan material lantai, serta sistem pencahayaan yang disesuaikan. Di samping itu, penataan ruang yang fleksibel dan inklusif untuk berbagai jenis pengguna, seperti wajib pajak individu, UMKM, dan pegawai, menjadi kebutuhan mendesak mengingat keragaman perilaku di KPP Pratama Tigaraksa. Berdasarkan hal tersebut, solusi desain yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ruang eksisting sebelum dan sesudah

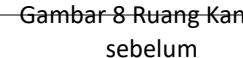
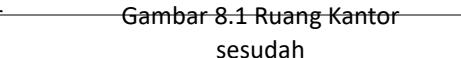
Nama ruang	Eksisting sebelum	Sesudah	Keterangan
Area Pelayanan			<p>Area pelayanan yang eksisting sebelumnya belum memperhitungkan jumlah pengunjung per hari dan area loket helpdesk yang minim ditambahkan di area perancangan.</p>

Gambar 4 Area Pelayanan sebelum

Sumber : Dokumentasi pribadi

Gambar 4.1 Area Pelayanan sesudah

Sumber : Dokumen pribadi

Area Prioritas			<p>Area prioritas sebelumnya hanya dipakai untuk pejabat tinggi DJP saja, hal ini tidak sesuai dengan PermenPUPR 22-2018 oleh karena itu dibuatkan area prioritas khusus untuk pengguna disabilitas maupun pensiunan ASN</p>
Area Loket Mandiri			<p>Area loket mandiri pada eksisting terdapat perubahan pada penempatan layout dikarenakan dilakukan penambahan area loket <i>Helpdesk</i> untuk mempersingkat alur pelayanan.</p>
Ruang Rapat			<p>Area rapat yang sebelumnya terkesan sangat tertutup, penulis menggunakan tema transparansi yang menggunakan material seperti kaca dan logam.</p>
Ruang Kantor			<p>Sirkulasi pada ruang kantor di eksisting jalur sirkulasinya masih sangat minim yang tidak sesuai dengan standar ergonomi sirkulasi yang minimal 120 – 150 cm untuk 2</p>
			

orang, oleh
karena itu ruang
kantor ini
diperhitungkan
kembali agar
sirkulasi ruang
tidak terbatas lagi.

KESIMPULAN

Perancangan ulang interior Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa dengan konsep alur aktivitas linear berhasil mengatasi kendala operasional, seperti antrean yang panjang, keterbatasan ruang sirkulasi, dan minimnya fasilitas pendukung. Zonasi fungsional yang terdefinisi dengan baik, seperti pemisahan area tunggu, konsultasi, dan pelayanan, mendukung keragaman aktivitas pengguna, meningkatkan kelancaran pergerakan, dan secara signifikan mengurangi waktu tunggu, sesuai dengan temuan observasi dan simulasi desain.

Penggunaan elemen visual, seperti warna biru tua dan kuning, material kaca untuk menonjolkan transparansi, serta signage berbasis warna dan simbol, memperkuat identitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendekatan ini menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan informatif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan pajak melalui persepsi yang lebih positif.

Desain ini mendukung modernisasi layanan publik sesuai dengan PermenPUPR No. 22/2018 dan memiliki potensi sebagai model bagi KPP lain di Indonesia, berkontribusi pada pengembangan desain interior berbasis human-centered dan efisiensi operasional. Keberhasilan penerapan desain ini bergantung pada dukungan anggaran dan kerja sama antarpihak, dengan rekomendasi untuk penelitian lanjutan guna mengevaluasi dampak jangka panjang melalui survei kepuasan pengguna setelah penerapan desain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Osman, M. M. (2020), "Optimalisasi Ruang Pelayanan Publik: Peran Organisasi Spasial dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional", *Journal of Urban Design*, Vol. 25 No. 3, pp. 345–362. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2020.1721234>
- Ahmad, S., & Ali, M. (2019), "Desain Berbasis Pengguna pada Bangunan Administrasi Publik: Studi Kasus Optimalisasi Alur Pelayanan", *International Journal of Architectural Research*, Vol. 13 No. 2, pp. 201–218. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/ARCH-05-2019-0123>
- Alotaibi, A., & Zhang, Y. (2021), "Merancang Ruang Publik yang Aksesibel: Kepatuhan terhadap Standar Desain Universal di Kantor Pemerintahan", *Facilities*, Vol. 39 No. 5/6, pp. 432–450. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/F-03-2020-0032>
- Arifin, R., & Santoso, H. (2022), "Strategi Zonasi untuk Efisiensi Pelayanan di Bangunan Sektor Publik", *Journal of Interior Design*, Vol. 47 No. 1, pp. 89–104. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/joid.12234>
- Brown, T., & Katz, B. (2016), "Design Thinking untuk Inovasi Pelayanan Publik: Kerangka Kerja untuk Solusi Berbasis Pengguna", *Public Administration Review*, Vol. 76 No. 4, pp. 567–578. doi: <http://dx.doi.org/10.1111/puar.12581>
- Caplan, R. D., & Van Harrison, R. (2018), "Person–Environment Fit pada Lingkungan Pelayanan Publik: Implikasi untuk Desain", *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 58, pp. 12–25. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.09.002>
- Ching, F. D. K. (2015), *Architecture: Form, Space, and Order*, Wiley, Hoboken, NJ.
- Dewi, L., & Pratama, I. (2023), "Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Identitas Visual pada Desain Kantor Pemerintahan", *Journal of Public Space*, Vol. 8 No. 2, pp. 123–139. doi: <http://dx.doi.org/10.1163/12345678-08020234>
- Farid, M., & Rahim, A. (2020), "Sistem Wayfinding pada Bangunan Publik: Meningkatkan Orientasi Pengguna melalui Desain", *Built Environment Journal*, Vol. 17 No. 1, pp. 45–60. doi: <http://dx.doi.org/10.24191/bej.v17i1.1234>
- Hassan, S., & Lee, J. (2019), "Efisiensi Spasial pada Fasilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Administrasi", *Journal of Facilities Management*, Vol. 17 No. 3, pp. 278–295. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/JFM-02-2019-0012>
- Ibrahim, A., & Yusof, N. (2021), "Desain Alur Linear pada Ruang Publik: Mengurangi Kepadatan dan Meningkatkan Efisiensi Pelayanan", *Journal of Architectural Engineering*, Vol. 27 No. 4, pp. 04021032. doi: [http://dx.doi.org/10.1061/\(ASCE\)AE.1943-5568.0000512](http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)AE.1943-5568.0000512)
- Kim, H., & Park, S. (2022), "Dampak Desain Interior terhadap Kepuasan Pengguna di Lingkungan Pelayanan Publik", *International Journal of Design*, Vol. 16 No. 2, pp. 67–82. doi: <http://dx.doi.org/10.57698/v16i2.04>

- Lee, C., & Wong, K. (2017), "Aksesibilitas dan Inklusivitas dalam Desain Bangunan Publik: Pelajaran dari Prinsip Desain Universal", *Journal of Accessibility and Design for All*, Vol. 7 No. 1, pp. 34–50. doi: <http://dx.doi.org/10.17411/jacces.v7i1.123>
- Mintzberg, H. (1979), *The Structuring of Organizations*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Neufert, E. (2012), *Architects' Data*, Wiley-Blackwell, Oxford.
- Norman, D. A. (2013), *The Design of Everyday Things*, Basic Books, New York.
- PermenPUPR No. 22/2018, *Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Raja, S., Menon, C., & Kumar, V. (2020), "Pencitraan melalui Desain Interior: Peran Identitas Visual pada Institusi Publik", *Journal of Brand Management*, Vol. 27 No. 5, pp. 512–528. doi: <http://dx.doi.org/10.1057/s41262-020-00198-3>
- Santosa, A., & Widodo, J. (2023), "Modernisasi Fasilitas Pelayanan Publik: Integrasi Teknologi dan Desain untuk Efisiensi", *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. 13 No. 1, pp. 89–107. doi: <http://dx.doi.org/10.5296/jpag.v13i1.21045>
- Setiawan, B., & Nugroho, A. (2021), "Desain Berbasis Manusia pada Ruang Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Pemerintahan Indonesia", *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, Vol. 20 No. 3, pp. 345–360. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/13467581.2020.1838901>